

Giat Tri Sambodo

Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan
Universtas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: massam_kotagede@yahoo.com

Ulung Pribadi

Dosen Magister Ilmu Pemerintahan
Universtas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: ulungpribadi@gmail.com

[http://dx.doi.org/10.18196/
jgpp.2016.0052](http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0052)

Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, Galur, Kulonprogo, DI. Yogyakarta

ABSTRACT

The paper has the title of the implementation of collaborative governance in the Brosot cultural village, Galur subdistrict, Kulonprogo Regency. Research aimed to know Bagaimana Collaborative Brosot cultural village implementation, Galur subdistrict, Kulonprogo Regency and factors any prejudicial Collaborative Brosot cultural village, Galur subdistrict, Kulonprogo. Regency Research conducted with kualitatif method, withdrawal data done through interview information sources, observation, and study documentation. *Result Research show that, Model Collaborative Governance in Desa Budaya Brosot, generally speaking is equal Model Collaborative Governance that made by Ansel and Gash. There is some factor culture affect that Collaborative Governance implementation in Brosot cultural village, namely: kinship relation, Arisan, Jam Karet, Musyawarah Mufakat, Nggih Kepanggih ra Ngaruhke, Gotong Royong and Swadaya, Mokogi, Ngombyongi, and Mosobodoa, paternalistic and the People about that is all.*

Keywords: Collaborative Governance, village culture

ABSTRAK

Tulisan ini mempunyai judul Pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo. Penelitian bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Collaborative Desa Budaya Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo dan Faktor – Faktor apa saja yang mempengaruhi Collaborative Desa Budaya Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, pengambilan data dilakukan melalui wawancara narasumber, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwa, Model Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, secara umum adalah sama dengan Model Collaborative Governance yang dibuat oleh Ansel dan Gash. Ada beberapa faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot, yaitu: Hubungan Kekerabatan, Arisan, Jam Karet, Musyawarah Mufakat, Nggih ra Kepanggih, Ngaruhke, Gotong Royong dan Swadaya, Mokogi, Ngombyongi, dan Mosobodoa, Paternalistik dan Orangnya Sekitar Itu itu Saja.

Kata Kunci: Collaborative Governance, desa budaya

PENDAHULUAN

Setelah reformasi terjadi perubahan mendasar dalam pemerintahan, rakyat lebih mengetahui hak dan kewenangan, dan semakin menuntut untuk terlibat dalam pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah tidak lagi berdiri sendiri sebagai pelaku pembangunan, Partai Politik dan LSM menjadi kelompok penekan penting yang memaksa pemerintah untuk melibatkan mereka dan masyarakat sejak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dikenal sebagai Collaborative Governance yang di definisikan sebagai Pemerintah terlibat dalam forum resmi yang diikuti oleh LSM dan atau masyarakat yang bertujuan untuk mencapai mufakat dalam suatu persoalan bersama, LSM dan atau masyarakat tersebut bukan hanya berpartisipasi namun juga berkolaborasi serta ada pembagian peran yang jelas. *Collaborative Governance* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan badan public dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan public atau mengelola program public, serta asset public (Chris Ansel & Alison Gash, 2007).

Collaborative Governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemangku kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik dengan tujuan mendapatkan sumberdaya guna melaksanakan pembangunan sesuai harapan para pemangkukepentingan tersebut. Sumberdaya tersebut berada dan dimiliki para pemangku kepentingan tersebut.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, melaksanakan program seperti Collaborative Governance dalam bentuk Program Desa Budaya sejak tahun 1995. Pelaksanaan Collaborative Governance itu berbeda dengan apa yang dilakukan di daerah lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi DIY. Desa Budaya adalah wahana sekelompok manusia yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan system kepercayaan (*religi*), system kesenian, system mata pencaharian, system teknologi, system komunikasi, system social, dan system lingkungan, tata ruang, dan arsitektur dengan

mengaktualisasikan kekayaan potensi budayanya dan mengkonservasinya kekayaan budaya yang dimilikinya dalam wilayah suatu desa. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 325/KPTS/1995 tanggal 24 November 1995 telah ditetapkan 32 desa sebagai Desa Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa program kegiatan yang telah dan sedang dilakukan, seperti: Sarasehan pengelolaan Desa Budaya, Pelatihan Teknis, Bimbingan Teknis melalui Pamong Budaya, Upacara Adat, Festival Upacara Adat, Festival Desa Budaya, Festival Dolanan Bocah, dan Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana budaya

KERANGKA TEORI

Selama lebih dari 30 tahun, pemerintahan mengalami banyak perubahan akibat dari banyak tekanan untuk bertindak lebih efisien dan efektif. Mereka bertransformasi mencari bentuk dan mendesain ulang bagaimana mengelola pemerintahan. Hasilnya adalah beberapa bentuk devolusi, desentralisasi, *downsizing*, dan debirokratisasi yang di gabung dengan privatisasi, system kontrak, mengadopsi system bisnis yang memperlakukan masyarakat sebagai yang harus dilayani (Peter J Robertson, 2009). Pada masa selanjutnya adalah berkembang Collaborative Governance. Penelitian mengenai Collaborative Governance sudah banyak dilakukan dan banyak mengambil obyek lokasi di mancanegara serta masih sedikit yang mengambil obyek di Indonesia dan berfokus pada suatu Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Tim Inisiator Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis pada tahun 2005 dengan Judul Bersama Membangun Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Taman Nasional Batang Gadis. Model kolaborasi yang dilakukan adalah sesuai dengan Model Collaborative Governance Ansel dan Gash, 2007. Kolaborasi tidak diawali dengan adanya konflik yang tinggi, kolaborasi diawali dengan visi bersama untuk melestarikan alam.

Penelitian yang dilakukan oleh Peter J. Robertson pada tahun

2009 dengan judul *An Assessment of Collaborative Governance in a Network for Sustainable Tourism: The Case of RedeTuris*. Hasil penelitian menemukan bahwa Rede Turis di inisiasi oleh Dua Private Sector yang berbeda dengan apa yang di tulis oleh Ansel & Gash (2007) bahwa Collaborative Governance di inisiasi oleh Badan Publik. Walaupun dalam proses selanjutnya peran pemerintah tetap dominan dalam membawa kemajuan Rede Turis, dalam penelitian ini disebut dengan istilah *lead organization-governed*. Penelitian ini mengkaji mengenai *Networking* di dalam Rede Turis yaitu: *Type of network and Network formation and development*. *Type of network* dari Rede Turis meliputi 4 tipe network seperti yang dikemukakan oleh Agranoff (2003) yaitu:

- a) Networks informational (berpartisipasi dalam pembagian informasi dan mencari solusi),
- b) Developmental (pendidikan anggota guna mempunyai kemampuan mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi bersama),
- c) Outreach (Anggota menciptakan strategi yang dapat diterapkan dengan bekerjasama dengan organisasi lainnya)
- d) Action (Anggota secara bersama beraksi melaksanakan program kegiatan dalam berbagai tingkatan).

Temuan yang menarik adalah pengaruh istiadat dalam penerapan collaborative governance, yaitu *Brazilian Time*, *Yes mean No*, dan *Carioca*. *Brazilian Time* merupakan kebiasaan penduduk Brasil untuk membatalkan rapat atau tidak datang. *Yes mean No* adalah ketika di forum menyatakan setuju tapi pada dasarnya tidak setuju. *Carioca* adalah perasaan saling curiga. Disamping itu masyarakat Brasil juga bersifat sosial, dermawan, dan menghindari konflik.

Penelitian yang dilakukan Ansel dan Gash (2007) setelah menelaah 137 tulisan mengenai Collaborative Governance, kemudian mendefinisikan Kolaborasi Governance adalah pemerintahan yang

disusun dengan melibatkan badan public dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan public atau mengelola program public, serta asset public. (Ansel dan Gash, 2007). Ansel dan Gash (2007) juga menetapkan 6 Kriteria penting untuk mendefinisikan Kolaborasi Governance:

- a) Forum di inisiasi oleh badan public
- b) Peserta forum termasuk organisasi non pemerintah
- c) Peserta terlibat dalam pengambilan kebijakan bukan hanya berperan konsultasi saja
- d) Forum tersebut bersifat formal dan merupakan rapat bersama.
- e) Forum tersebut bertujuan mencari mufakat atas kebijakan (walaupun dalam prakteknya mufakat tidak selalu dilakukan)
- f) Fokus dari kolaborasi adalah kebijakan public dan pengelolaan public. Chris Ansell & Alison Gash, 2007 memodelkan kolaborasi governance sebagai berikut:

(Lihat gambar 1)

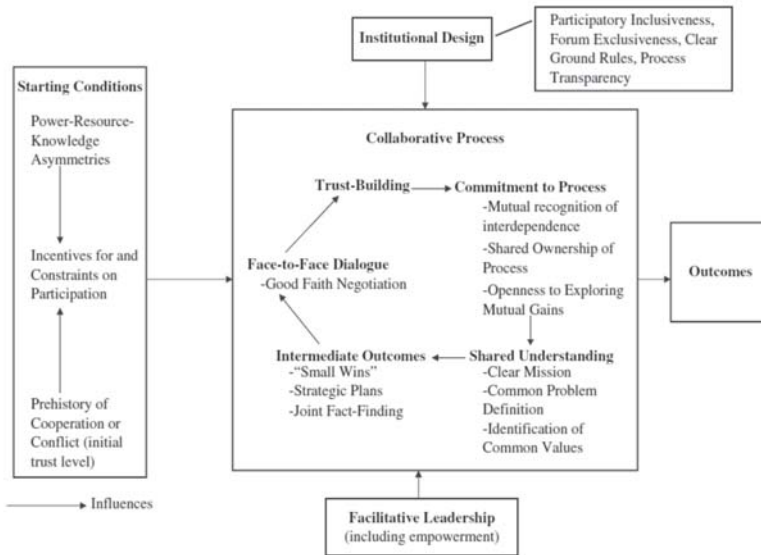
Penelitian yang dilakukan oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh pada tahun 2011, mendefinisikan Collaborative Governance sebagai proses dan struktur pembuatan kebijakan publik dan manajemen yang mengajak personal di luar lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan atau masyarakat, swasta, dan sipil dalam rangka mencapai tujuan publik. Ketiga peneliti ini memodelkan Collaborative Governance sebagai berikut:

(lihat gambar)

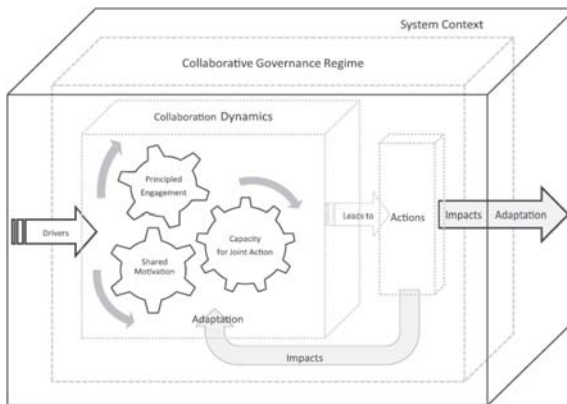
Berdasar tinjauan pustaka, belum ada penelitian yang mengambil study kasus di Desa Budaya di DIY. Model Collaborative Governance yang ada merupakan model Collaborative Governance yang ada di mancanegara.

Ansel dan Gash (2007) yang telah menelaah 137 kasus kemudian megeneralisasinya menjadi satu pengertian umum tentang Collabo-

GAMBAR 1. MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE OLEH ANSEL DAN GASH (2007)



GAMBAR 2: THE INTEGRATIVE FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE GOVERNANCE OLEH KIRK EMERSON, TINA NABATCHI, DAN STEPHEN BALOGH (2011)



Collaborative Governance, namun dalam kenyataan hal itu tidak dapat dilakukan, Collaborative Governance di pengaruhi oleh banyak faktor, situasi, kondisi, dan pelaku yang melaksanakan hal tersebut.

Menurut Ansel dan Gas (2007) Forum Collaborative Governance

di inisiasi oleh Pemerintah namun pada kenyataannya Rede Turis sebagai Forum Collaborative Governance di inisiasi oleh 2 Private Sector (Peter J Robetson, 2009). Jadi dalam kenyataannya Collaborative Governance penerapannya sangat bervariasi dan kata kunci yang bisa di ambil adalah Collaborative Governance adalah perpaduan pemerintah dan non pemerintah untuk mengelola urusan publik.

Kolaborasi di Desa di DIY sudah berlangsung sejak lama, kita mengenal istilah Gotong royong, golong gilig, atau swadaya, istilah tersebut merupakan wujud dari adanya kolaborasi diantara penduduk desa dan pemerintah, walaupun kita tahu tingkatan kolaborasinya bisa berbeda - beda. Namun yang pasti secara sederhana dapat di uraikan bahwa Gotong royong, Golong gilig, atau Swadaya tersebut, diikuti oleh seluruh penduduk desa dalam forum yang secara tradisional di sebut arisan, dan kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan semua yang terlibat dalam forum arisan tersebut, dan bahkan mereka juga secara swadaya akan urun atau ikut andil membiayai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kolaborasi Governance Desa di DIY pada mulanya sangat didukung oleh sistem pemerintahan Daerah di DIY, sebelum tahun 1950-an yang otonomi terletak di desa dengan adanya DPR Desa dan Pendapatan Asli Desa yang berasal dari Tanah Kas Desa (Tanah Pelungguh), dan Pemimpin Desa di pilih secara langsung dan digaji dengan Tanah Bengkok. Sehingga memaksa Pemerintah Desa untuk memperhatikan aspirasi dan masyarakat desa, serta berkolaborasi dalam pembangunan. Contoh yang berlangsung sejak lama adalah perbaikan jalan desa, perbaikan lingkungan alam, pengairan, dll. Namun kini sesuai perkembangan pengetahuan dan pemangku kepentingan proses kolaborasi lebih kompleks lagi. Yang nantinya akan di uraikan dalam tulisan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

- a. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif- kualitatif.
-

TABEL 2. A DIAGNOSTIC OR LOGIC MODEL APPROACH TO COLLABORATIVE GOVERNANCE

Dimension and Components	System Context	Drivers	The Collaborative Governance Regime			Outputs Collaborative Actions	Collaborative Outcomes	
			Principled Engagement	Shared Motivation	Capacity for Joint Action		Impacts	Adaptation
Elements within Component	- Resource Conditions - Policy - Legal Frameworks - Failure to Address Issues - Political Dynamics/ Power Relations - Network Connectedness - Levels of Conflict/Trust - Socio-economic/ Cultural Health & Diversity	- Leadership - Consequential Incentives - Interdependence - Uncertainty	- Discovery - Definition - Deliberation - Determination	- Mutual Trust - Mutual Understanding - Internal Legitimacy - Shared Commitment	- Procedural/ Trust - Institutional Arrangements - Leadership - Knowledge - Resources	Will depend on context and charge, but might include: - Securing Endorsements - Enacting Policy, Law, or Rule - Marshalling Resources - Deploying Staff - Siting/ Permitting - Building/ Cleaning Up - Enacting New Management Practice - Monitoring Implementation - Enforcing Compliance	Will depend on context and charge, but aim is to alter pre-existing or projected conditions in System Context	- Change in System Context - Change in the CGR - Change in Collaboration Dynamics

Sumber: Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh (2011)

b. Lokasi Penelitian di di Desa Budaya Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo.

c. Jenis Data:

1) Data Sekunder bersumber pada Dinas Kebudayaan DIY dan Pengelola Desa Budaya berupa hasil penelitian terdahulu, catatan, buku, laporan tertulis dan foto yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dan Data dari perorangan berupa foto.

2) Data Primer berupa observasi langsung di lokasi pada saat berlangsungnya kegiatan di Desa Budaya dan wawancara langsung dengan pelaku yaitu Pengelola Desa Budaya, Dinas Kebudayaan DIY, Pengurus Organisasi Seni di Desa Budaya, Pemangku Upacara Adat di Desa Budaya.

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Pengamatan dilakukan terhadap pengelolaan Desa Budaya, yaitu pelaku yang terlibat dan proses atau aktivitas yang

dilakukan. Observasi dilakukan dengan melibatkan diri dalam pelaksanaan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan di Desa Budaya guna melihat fenomena - fenomena yang berlangsung.

2) Wawancara

Wawancara dengan Para pelaku yang terlihat dalam proses pengelolaan Desa Budaya, bagaimana keterlibatan dan andil pelaku sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan. Wawancara yang dilakukan dilakukan dengan pertanyaan terbuka yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat wawancara, sehingga tidak ada panduan pertanyaan yang ditetapkan.

3) Study Pustaka

4) Study Dokumentasi

Study dokumentasi dilakukan terhadap data - data yang sudah tersedia di Dinas Kebudayaan DIY dan Pengelola Desa Budaya yang berupa hasil penelitian terdahulu, catatan, buku, laporan tertulis dan foto yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dan Data dari perorangan berupa foto.

e. Unit Analisa Data

Pengelola Desa Budaya di Desa Budaya Brosot dan Dinas Kebudayaan DIY yang merupakan pelaku dalam Pembangunan Desa Budaya.

f. Teknik Pemilihan Narasumber

Dalam memilih narasumber penelitian kualitatif menggunakan teknik non probabilitas, dan metode pemilihan narasumber dalam penelitian ini dengan teknik snowball..

g. Teknik Analisa Data

Model analisa data yang akan dipergunakan adalah model analisis data yang dikenalkan oleh Spradley (1980).

1) Analisis Domain (Domain analysis).

2) Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*).

- 3) Analisis Komponensial (*Componential Analysis*).
- 4) Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*).

PEMBAHASAN

HASIL TEMUAN LAPANGAN

1. PROSES *COLLABORATIVE GOVERNANCE*

a) Face to Face Dialog

Face to Face Dialog atau pertemuan tatap muka merupakan pertemuan antara berbagai pihak dalam satu lokasi dan dalam waktu yang sama sehingga terjadi dialog secara langsung atau interaktif antara berbagai pihak tersebut, untuk membahas suatu kepentingan bersama. Dialog secara langsung di Desa Brosot sudah terlembaga dengan baik, Hal itu dimungkinkan dengan wilayah Desa Brosot yang tidak terlalu luas (322.5336 Ha.) dan mudahnya transportasi di dalam desa. Hampir seluruh jalan desa sudah cor beton maupun aspal. Hal tersebut memudahkan warga desa dalam melaksanakan pertemuan.

Bentuk *Face to Face Dialog* yang dilakukan di desa, antara lain Arisan dan Rapat. Arisan merupakan budaya yang sudah mengakar, di dalam masyarakat. Ada Arisan lingkup Pedukuhan, Arisan Lingkup RT, Arisan Bapak – Bapak, Arisan Ibu – Ibu, Arisan Muda – Mudi, Arisan PKK, Arisan Apsari, Arisan Klomtan dan lain sebagainya. Biasanya arisan yang sudah melembaga tersebut dipergunakan untuk memberikan informasi ataupun membahas permasalahan, dan pengambilan keputusan dalam pembangunan Desa Budaya Brosot.

Disamping Arisan terdapat juga rapat – rapat yang diselenggarakan, hal ini dilakukan jika ada urusan yang mendesak segera diselesaikan atau hanya perlu di musyawarahkan oleh sedikit orang. Rapat – rapat biasanya berlangsung kalau ada kepanitian tertentu, misalnya Panitia Merti Desa, Panitia Perayaan Hari Besar Nasional, dll.

Proses yang berlangsung dalam arisan dan rapat – rapat tersebut biasanya adalah musyawarah mufakat.

b) Trust Building

Membangun kepercayaan bahwa Para Pihak memang mempunyai niatan yang sama untuk mengambil kebijakan yang terbaik untuk semua Pihak. *Trust Building* dimulai dengan membangun komunikasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam Desa Budaya, dan sudah sejak lama, hubungan antar lembaga kemasyarakatan maupun lembaga pemerintah yang baik sangat mendukung upaya saling membangun kepercayaan. Lembaga tersebut membangun kepercayaan dengan tidak pernah membedakan anggota atas dasar suku, agama, ras, dan golongan.

Biasanya untuk menjaga agar ada pertemuan berkala setiap bulan, selalu diadakan arisan. Di dalam arisan selalu ada waktu untuk tokoh atau pimpinan masyarakat menginformasikan kebijakan pemerintah daerah, kabupaten, maupun desa dan warga juga di beri waktu untuk mengemukakan pendapatnya pada sesi selanjutnya. Keterbukaan informasi ini menjadi kunci untuk membina kepercayaan. Dan hal pokok lainnya adalah komitmen Pemerintah Desa untuk transparan dan bertanggungjawab. Pemerintah Desa selalu melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam suatu kepanitian kegiatan dalam membangun Desa Budaya.

c) Comitment to Process

Comitment to Proces merupakan komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu guna mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Saling berbagi komitmen, berarti Mereka saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi permasalahan dan solusi, bahwa proses ini merupakan milik bersama, dan Saling terbuka untuk mendapatkan manfaat bersama.

Hasil keputusan arisan dan rapat biasanya di ambil melalui

musyawarah untuk mufakat, sehingga tidak ada yang merasa kalah dan menang. Bahkan ada lembaga kemasyarakatan yang menyatakan komitmennya mendukung program Desa Budaya dalam program dan kegiatannya. Walaupun masyarakat yang terlibat dalam kepanitian pada umumnya sedikit, dan merekalah yang nantinya mokogi, dan warga yang lain ngombyongi, bahkan bersifat mosobodoa Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk gotong royong dan swadaya, gotong royong berupa tenaga dan swadaya berupa uang.

Dalam kepanitian tersebut Pemerintah Desa bersama - sama dengan pengurus Desa Budaya selalu berupaya untuk selalu melibatkan berbagai lembaga kemasyarakatan yang diwakili tokoh - tokohnya.

d) Share understanding

Saling berbagi pengertian dan pemahaman bahwa Misi dari Forum ini adalah tanggung jawab bersama, meidentifikasi permasalahan agar mempunyai pemahaman yang sama, dan meidentifikasi nilai - nilai dasar yang menjadi dasar bagi proses ini.

Berbagai pengertian dan pemahaman sudah diupayakan oleh Pemerintah Desa, Pengurus Desa Budaya, dan komponen masyarakat lainnya. Pemerintah Desa selalu berupaya untuk menjalin komunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat dan secara timbal balik juga meminta masukan pendapat dari masyarakat.

Pemerintah Desa telah mendirikan Radio Komunitas Swara Desa sebagai wahana membina informasi, terlebih lagi dalam pembinaan budaya serta adat tradisi. Dalam rapat - rapat dan arisan selalu ada pemberian informasi dan peserta selalu dimintai pendapatnya sehingga terbina pengertian dan pemahaman, selanjutnya dapat diambil mufakat untuk memutuskan suatu permasalahan tertentu dengan kata lain terjadi musyawarah mufakat.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Desa adalah memotivasi dan ngaruhke ke lembaga kemasyarakatan sehingga baik kelem-

106 bagaan formal maupun informal yang ada di Desa Brosot, masing-masing saling menjalin hubungan untuk dapat beraktifitas guna mendukung kegiatan Pemerintah Desa.

e) Intermediate outcom

Intermediate outcome adalah hasil – hasil sementara atas proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis.

Hasil sementara yang mulai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu penyelenggaraan event – event meliputi: Festival Desa Budaya, Festival Bentara Upacara Adat, Merti Desa, dan berbagai workshop. Beberapa event diselenggarakan dengan inisiatif Desa Brosot, dan ada beberapa event merupakan partisipasi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DIY, Pemerintah Kecamatan Galur, Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulonprogo, dan lain sebagainya. Event tersebut memberi manfaat secara sosial budaya dan juga manfaat ekonomi. Event tersebut, menimbulkan keramaian yang mampu menciptakan peluang usaha berjualan dan meningkatkan pendapatan warga Desa.

2. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

a) Starting Condition

Starting Condition, merupakan kondisi awal dimana *Collaborative Governance* dilaksanakan, meliputi: Sejarah kerjasama di masa lalu, potensi, dan insentif yang diharapkan dari proses *Collaborative Governance*.

Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pemerintah sudah seringkali bekerjasama dalam melaksanakan berbagai event yang diselenggarakan secara berkala misalnya Merti Desa, 17-an, Upacara Tradisi dan event yang di selenggarakan pada saat tertentu misalnya Festival Desa Budaya, Festival Bentara Upacara Adat, dan lain sebagainya.

Kerjasama juga dilaksanakan ketika ada pembangunan prasarana lingkungan, dan lain sebagainya.

Desa Budaya Brosot mempunyai dua kebiasaan penting yang sekarang masih berlangsung yaitu Menyelesaikan permasalahan dengan Musyawarah dan melaksanakan hasil musyawarah dengan gotong royong serta swadaya, dua kekuatan inilah yang menjadi kunci suksesnya pembangunan Desa Budaya. Dan yang lebih menggembarakan lagi, tidak tercatat adanya konflik yang menonjol di dalam Desa Brosot.

b) Institutional Design

Institutional Design merupakan, bagaimana *Forum Collaborative Governance* itu di desain, Partisipasi, Forum hanya dihadiri oleh anggota, mempunyai aturan yang jelas, Prosesnya terbuka.

Desa Budaya memiliki kepengurusan tetap yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Personil yang duduk dalam struktur Desa Budaya mewakili lembaga kemasyarakatan atau lembaga pemerintahan tertentu, hal ini diharapkan kinerja organisasi lebih efektif. Dan uniknya ketika ada kegiatan, Mereka mempergunakan kedudukan di organisasi asal untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk menyukkseskan kegiatan Desa Budaya. Atau dengan kata lain untuk melaksanakan kegiatan Desa Budaya mereka juga bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti untuk pelaksanaan Kegiatan Merti Desa, biaya ditanggung bersama melalui iuran masing - masing Kepala keluarga yang dikoordinir Dukuh.

Untuk melaksanakan kegiatan Desa Budaya, pemerintah Desa dan Pengurus Desa Budaya membentuk kepanitian yang bersifat terbuka Biasanya dari pihak pemerintah Desa hanya menempatkan satu orang personil supaya mengawal agar pelaksanaan kegiatan tertib secara administrasi dan dari komponen masyarakat terdiri dari berbagai macam unsure sesuai kebutuhan, misalnya tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh budaya, dan lain sebagainya.

Proses didalam pengambilan keputusan dalam rapat - rapat diikuti terbatas pada peserta rapat, namun tetap berlangsung terbuka.

c) *Fasilitative Leadership*

Budaya Yogyakarta yang paternalistik ternyata masih berlangsung, baik jeleknya kepemimpinan menentukan kemajuan Desa Budaya Brosot. Aparat Pemerintah Desa Brosot mempunyai komitmen untuk selalu transparan dan partisipatif hal ini merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan kepada warga Desa Brosot. Aparat Pemerintah Desa Brosot bersama - sama dengan Pengelola Desa Budaya membentuk kepanitiaan dalam setiap kegiatan. Dan Aparat Pemerintah Desa tidak pernah berusaha mendominasi kepanitiaan tersebut.

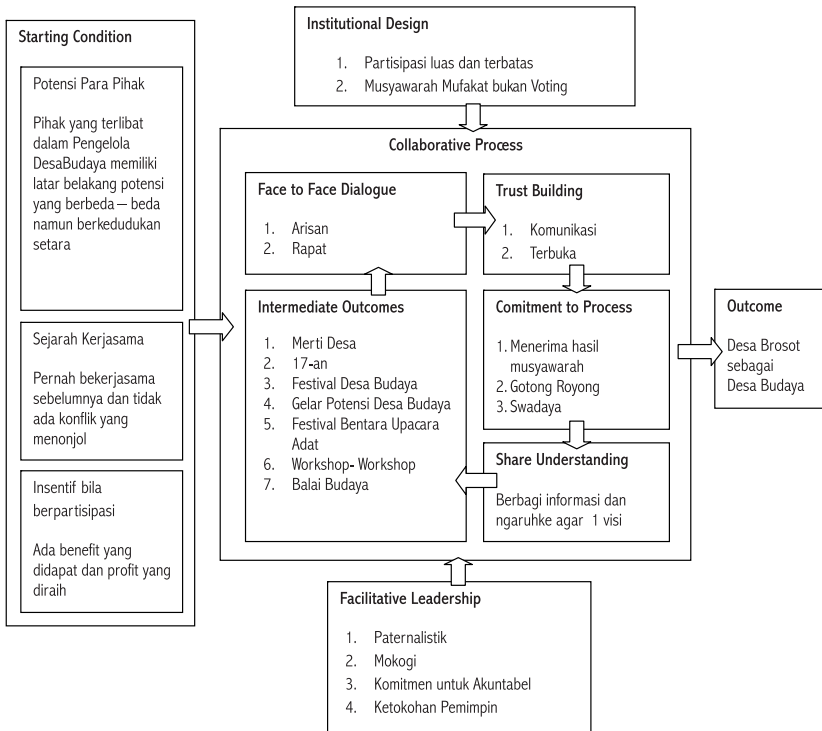
Walaupun hanya menempatkan seorang atau dua orang personil dalam kepanitiaan, Aparat Pemerintah Desa dan Pengelola Desa Budaya masih harus mokogi didalam kepanitiaan tersebut, mengarahkan jalannya kegiatan, dan memberi saran dan aktif dalam pengambilan keputusan yang berlangsung secara musyawarah. Masyarakat biasa berperan untuk ngombyongi bahkan mosobodoa.

ANALISA

Analisa merujuk pada model hasil kajian yang dilakukan oleh Chris Ansell dan Alison Gash dengan judul *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Model ini dipakai karena model *Collaborative Governance* ini dibuat dengan mengkaji 137 kasus *Collaborative Governance* yang mleingkupi berbagai sektor kebijakan dan dengan model inilah, banyak *Collaborative Governance* yang mencapai kesuksesan. (Ansell and Gash, 2007)

Merujuk pada Model *Collaborative Governance* (Ansel and Gash, 2007), *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2. MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DI DESA BUDAYA BROSOT



Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot di inisiasi Pemerintah Provinsi DIY melalui Keputusan Gubernur DIY nomer: 325/KPTS/95 pada tahun 1995, dalam keputusan tersebut ada 32 Desa di DIY yang ditetapkan sebagai Desa Budaya. Selanjutnya melalui Dinas Kebudayaan DIY dibentuk pengelola Desa Budaya dan Program Kegiatan. Program Kegiatan ini ada yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan DIY, maupun bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten di DIY dan Pemerintah Desa ataupun lahir dari inisiatif Dinas Kebudayaan Kabupaten atau Pemerintah Desa,

1) Starting Condition

Pengelola Desa Budaya terdiri dari Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Brosot. Lembaga Kemasyarakatan

110 meliputi Karang Taruna, PKK. Takmir Masjid, Organisasi Seni, Dukuh, dan lain sebagainya. Pihak - Pihak yang terlibat sebagai Pengelola Desa Budaya ini berkedudukan sejajar, dan masing - masing mempunyai kekuatan potensi yang sama besarnya dan berbeda karena mewakili lembaga kemasyarakatan yang anggotanya dari golongan yang berbeda beda. Perbedaan potensi inilah yang menimbulkan kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan cara saling melengkapi sesuai kemampuan masing - masing. Kesetaraan kekuatan tersebut juga dipengaruhi, pengetahuan, wawasan, dan kecerdasan personal yang mewakili pihak - pihak dalam Pengelola Desa Budaya.

Kemampuan personal yang mewakili Pihak - Pihak yang terlibat dalam Pengelola Desa Budaya, berpengaruh besar terhadap jalannya *Collaborative Governance*. Hal ini terlihat ketika berlangsung diskusi, ketika diberi kesempatan mengemukakan pendapat, ada beberapa yang diam tidak berpendapat, dan kualitas dari pendapat yang Mereka sampaikan terkadang tidak memberi solusi atas pokok permasalahan yang sedang dibahas, atau bahkan ngelantur.

Pihak - pihak yang terkait dengan Pengelolaan Desa Budaya mempunyai sejarah kerjasama yang panjang sebelum Desa Budaya di tetapkan, Mereka sudah terbiasa untuk bertemu dalam forum arisan yang biasanya berdasar golongan tertentu, misalnya, RT, RW, PKK. Dusun, Organisasi seni dan lain - lain. Dan tentunya terkadang Mereka bergotong royong dan berswadaya untuk melaksanakan Program Kegiatan tertentu, misalnya: Peringatan Hari Raya Idul Adha, Perbaikan Jalan, Perbaikan Gardu Ronda, Merti Desa, Pemilu, Lelayu, dan lain sebagainya.

Kerjasama yang baik di Desa Brosot di dukung oleh kondisi wilayah yang relatif sempit dengan jalan lingkungan yang baik pula, untuk memudahkan berpergian menghadiri berbagai arisan ataupun rapat. Kerjasama yang baik juga di dukung hubungan kekerabatan yang baik. Struktur Masyarakat Desa Brosot relatif homogen dengan

penduduk asli yang dominan dan pendatang yang sangat sedikit. Penduduk asli inilah yang biasanya masih mempunyai hubungan kekerabatan, baik kerabat dekat maupun kerabat jauh yang berasal dari satu nenek moyang pendiri Desa Brosot.

Pada awalnya Desa Brosot ditetapkan sebagai Desa Budaya, Mereka tidak mempunyai gambaran kecuali Desa Wisata, dimana Desa Brosot akan di perbaiki sarana lingkungannya, dikunjungi wisatawan, dan nantinya akan ada kesempatan mendapat penghasilan dari berjualan kerajinan ataupun makanan dan Kesenian pun akan sering pentas. Pembangunan Desa Budaya ini mempunyai banyak hal garapan, yang tentunya diharapkan akan meraih Profit secara ekonomi dan mendapat benefit secara budaya, dan sosial. Hal ini dipahami oleh Pihak – pihak yang terlibat sehingga memotivasi untuk terlibat dalam Desa Budaya. Setiap pembangunan Desa Budaya akan melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memberikan kesempatan untuk aktualisasi diri, mempererat rasa persaudaraan, melestarikan budaya, dan tentunya ada manfaat kesempatan ekonomi yang bisa didapat. Hal seperti inilah membuat mereka mau terlibat dalam pengelolaan Desa Budaya

Dalam Pelaksanaan Kegiatan, bisa dibentuk kepanitian – kepanitian yang anggotanya terbuka mewakili lembaga kemasyarakatan di Desa Brosot. Pengelola Desa Budaya sebulan sekali melaksanakan arisan untuk mengikat anggota untuk selalu datang dalam pertemuan sehingga terus terjalin komunikasi dan bila di butuhkan bisa melakukan rapat baik Pengelola Desa Budaya secara intern maupun Kepanitiaan yang dibentuknya. Dalam setiap arisan maupun rapat keputusan di ambil secara musyawarah mufakat dan tidak dikenal adanya voting.

2) *Facilitative Leadership*

Kepemimpinan menjadi hal yang berpengaruh penting dalam Pengelolaan Desa Budaya. Kemampuan personal setiap pemimpin

112 berpengaruh besar terhadap jalannya Collaborative Governance di Desa Budaya Brosot. Beruntung Desa Budaya Brosot memiliki pemimpin yang mempunyai komitmen untuk bersikap transparan, bertanggungjawab, dan partisipatif atau dengan kata lain, mempunyai Pemimpin yang mempunyai komitmen untuk bersikap akuntabel. Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan budaya selalu mengajak Pengelola Desa Budaya dan membentuk kepanitiaan serta Kepala Desa hanya menempatkan stafnya 1 atau 2 orang untuk mengawal agar pelaksanaan sesuai dengan peraturan dan tujuan kegiatan tercapai.

Pada Pengelolaan Desa Budaya Brosot terdiri banyak pemimpin atau *multiple leader*. *Multiple leader* tercipta ketika dalam setiap pelaksanaan kegiatannya Pengelola Desa Budaya membentuk kepanitiaan dan setiap kepanitiaan mempunyai pemimpin yang berbeda dengan Ketua Pengelola Desa Budaya, dan terkadang dalam melakukan pembagian kerja sehingga terbentuk seksi atau divisi yang bersifat otonom, dan mempunyai ketua tersendiri.

Kepala Desa memastikan semua pihak yang terkait dengan pembangunan Desa Budaya terwakili duduk dalam Lembaga Pengelola Desa Budaya. Dan Kepala Desa bersama – sama dengan Pengelola Desa Budaya memastikan semua pihak yang terkait terlibat dalam kepanitiaan yang melaksanakan tugas tertentu. Hal ini dilakukan agar tidak ada gejolak di masyarakat dikemudian hari. Disini seorang pemimpin harus memastikan keterlibatan secara luas peserta *Collaborative Governance* agar nantinya prosesnya berlangsung lancar.

Dalam pertemuan sebenarnya proses demokrasi. Ada adat istiadat musyawarah pertemuan, Ketua membuka pertemuan dan menyampaikan apa yang akan di bahas dalam pertemuan selanjutnya di adakan dialog dan setiap anggota forum di beri kesempatan yang sama untuk berbicara, namun sering terjadi pada Kepanitiaan, yang terjadi adalah yang berbicara orangnya itu – itu saja. Hal ini terjadi karena ada ketimpangan pendidikan, jenis pekerjaan, dan ketoko-

han, sehingga yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengemukakan pendapat. Setelah bredialog dan mendengar banyak pendapat, Ketua biasanya mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat dan menyimpulkan hasil pertemuan kemudian menawarkan kepada peserta pertemuan, apakah hasilnya bisa di sepakati. Dengan kecerdasan dan ketokohan Ketua biasanya hal ini disetujui sebagai mufakat.

Pemimpin dalam Forum Pengelola desa Budaya, ataupun Forum Kepanitian, karena ketokohnya mereka terpilih secara mufakat. Ketokohan pemimpin di Desa Budaya Brosot terbentuk oleh sejarah panjang keluarga asal seorang pemimpin, biasanya nenek moyang Mereka ada pemimpin di Desa tersebut, menguasai sebagian besar aset tanah sehingga mempunyai kekayaan, dan dengan kekayaannya Mereka mampu mendapatkan pendidikan tinggi yang tidak setiap warga dapat memperolehnya, dengan Pendidikan yang tinggi Mereka mempunyai kemampuan dan wawasan. Dan dengan segala predikat yang Mereka punyai Mereka mampu mengatasi segala permasalahan yang ada di Desa, dengan segala kebaikan dan andil Mereka terhadap Desa, sehingga kharisma ketokohnya terbentuk dan secara informal Mereka adalah tokoh yang di hormati, di segani, sebagai tempat mengadu, menyelesaikan segala permasalahan.

Di tambah lagi dengan budaya *patrinealistik* yang menempatkan Pemimpin sebagai *Patron* dan warga sebagai *klien*. Budaya ini menempatkan pemimpin sebagai tempat bertanya, memperoleh solusi atas permasalahan, dan tempat berlindung. Apabila atribut ini dipenuhi oleh seorang Pemimpin maka, warga sebagai *klien* akan memberi kesetiannya, dan mendukung apa yang dilakukan Pemimpinnya. Budaya *Patrinealistik* ini memberi dampak positif, dalam pertemuan Forum Pengelola Desa Budaya maupun Kepanitiaan yang terbentuk. Pemimpin mempunyai segala sumberdaya yang timpang dengan anggota forum yang lain, namun dengan segala kebijaksanaananya selalu memberi kesempatan kepada anggota lainnya untuk

114 berbicara, mendengarkan usul positif dari Mereka, dan meresume menjadi draft keputusan, yang akhirnya di setuju menjadi mufakat oleh anggota forum. Kesempatan berbicara kepada setiap anggota forum, walaupun terkadang kesempatan ini tidak di pergunakan oleh setiap anggota forum, menunjukkan adanya kesetaraan dan demokrasi di Desa Budaya. Keputusan yang diambil pun dilakukan secara mufakat dan tidak pernah terjadi voting.

Ketokohan seorang pemimpin juga dibentuk oleh budaya *Mokogi*, bahwa ketika Mereka mempunyai ide atau gagasan akan sesuatu hal, dan ketika hal itu di setuju Forum, maka Pemimpin ini harus *Mokogi* dalam swadaya maupun gotong royong. *Mokogi* diartikan sebagai sesuatu yang berdiri utama untuk mengawal pelaksanaan suatu kegiatan, ketika ada swadaya, Pemimpin sebisa mungkin memberikan dana terbesar dan ketika gotong royong Pemimpin harus aktif, dan ketika ada permasalahan Pemimpin harus mampu mengatasi. Apabila Pemimpin tidak bisa *mokogi* akan kehilangan legitimasinya, dan akan di sebut sebagai *gajah diblangkoni, iso kojah ra iso nglakoni*, (bisa berbicara tapi tidak bisa melaksanakan).

3) *Institutional Design*

Forum *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot mempunyai partisipasi yang luas, mencakup semua pihak yang terkait dengan Pembangunan Desa Budaya, namun pada pertemuan di Lembaga Pengelola Desa Budaya dan kepanitian – kepanitian yang mengikuti pertemuan terbatas pada Mereka yang telah terdaftar sebagai anggota Forum atau Mereka yang di undang karena terkait dengan persoalan yang di bahas dalam pertemuan. Dalam lembaga Pengelola Desa Budaya pihak – pihak yang menjadi anggota adalah Mereka yang mewakili lembaga kemasyarakatan yang terkait dengan Pembangunan Desa Budaya dan berada di wilayah Desa Brosot. Tidak di perkenankan LSM dari luar Desa Brosot terlibat, karena Mereka yakin LSM tersebut tidak mengenal Desa Brosot dengan baik, tidak

tulus membantu Desa Brosot, dan akan memperkeruh.

Adat Istiadat di Desa Budaya Brosot dalam memecahkan persoalan adalah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait, meminta semua pendapat yang hadir dalam pertemuan, menyimpulkan kebenaran, dan menyampaikan kesimpulan tersebut untuk di setujui menjadi mufakat bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini, merupakan cara untuk memuaskan semua pihak dan mengurangi penolakan terhadap hasil keputusan, di banding dengan pengambilan keputusan dengan cara voting yang cenderung membenturkan berbagai kepentingan secara langsung, yang pada akhirnya akan menimbulkan kekecewaan kepada pihak yang kalah voting, dan menimbulkan perpecahan Forum.

4) *Proses Collaborative Governance*

Face to face dialog atau pertemuan langsung menjadi penting untuk mengawali adanya *Collaborative Governance*, atau dengan kata lain, tanpa adanya pertemuan maka *Collaborative Governance* tidak akan berlangsung. *Face to Face dialog* di Lembaga Pengelola Desa Budaya Brosot terdiri dua hal, yaitu arisan dan rapat. Dalam forum inilah segala informasi dan permasalahan di sampaikan dan di bahas, dalam arisan ini pula berlangsung proses *trust building, share understanding*. Berlangsung. Selain arisan ada rapat - rapat yang berlangsung di sela - sela arisan apabila forum arisan tidak mencukupi. Pengelola Desa Budaya Brosot mempergunakan budaya arisan untuk mengaktifkan *Collaborative Governance*, dan dengan arisan ini tidak ada kesulitan untuk melakukan *face to face dialog*.

Trust Building untuk Desa Budaya Brosot yang penduduknya homogen dan rata - rata masih mempunyai hubungi kekerabatan serta tidak mempunyai sejarah konflik yang menonjol, bukanlah suatu persoalan. *Trust Building* antar Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Desa juga bukan merupakan persoalan, karena Kepala Desa di pilih dari warga Desa Budaya Brosot sehingga mempunyai

116 *legitimasi.*

Trust Building juga dimulai dari Pemerintah Desa yang berkomitmen untuk akuntabel dan selalu berkomunikasi dengan lembaga kemasyarakatan. Komunikasi diwujudkan dengan membangun Radio Komunitas Swara Desa yang menyiarkan segala informasi dari Pemerintah Desa kepada masyarakat dan informasi kemasyarakatan lainnya. Dan Pemerintah Desa selalu terbuka untuk melibatkan masyarakat apabila mempunyai Program dan Kegiatan yang menyangkut Masyarakat.

Comitment to Process di Forum Pengelola Desa Budaya Brosot, terlihat dari kehadiran di setiap pertemuan, namun hal ini bukan yang utama namun yang utama adalah komitmen untuk menerima hasil musyawarah yang menghasilkan mufakat, kemudian melaksanakannya dalam wujud gotong royong dan swadaya. Walaupun dalam musyawarah ada persetujuan terhadap mufakat yang di putuskan, bias jadi dia tidak komitmen untuk melaksanakan hasilnya, nanti terlihat ketika ada gotong royong atau swadaya, dia *Mokogi*, *Ngombyongi*, atau *Mosobodoa*.

Share Understanding sepertinya sudah terjalin baik melalui saling berbagi informasi dalam *arisan* dan Radio Swara Desa serta *ngaruhke*. *Ngaruhke* adalah budaya dengan berbagai wujud, dari mulai *uluk salam dan ngaruhke*. *Uluk salam* atau memberi salam ketika bertemu. *Ngaruhke* adalah mendatangi salah satu peserta forum apabila ada ketidaksetujuan dalam pertemuan untuk bertemu empat mata, untuk membicarakan permasalahan, sehingga tidak ada yang dipermalukan, dan terjalin 1 visi yang sama. *Ngaruhke* bias jadi datang silaturahmi ke seorang peserta forum untuk member semangat apabila sedang melaksanakan keputusan forum.

Intermediate Outcome adalah sesuatu yang menimbulkan semangat untuk bersama - sama terlibat dalam Lembaga Pengelola Desa Budaya Brosot. Tanpa adanya hal ini, Mereka ragu akan apa yang Mereka kerjakan di Lembaga Pengelola Desa Budaya Brosot. Dengan

adanya *Intermediate Outcome* semakin meyakinkan bahwa outcome jangka panjang yaitu Desa Brosot sebagai Desa Budaya semakin tercapai.

Intermediate Outcome dari Lembaga Pengelola Desa Budaya Brosot yakni Merti Desa dan 17-an yang terselenggara setiap tahun, Memperoleh Kegiatan Pembangunan Balai Budaya, Mengikuti Workshop - Workshop baik manajemen dan teknis dari Dinas Kebudayaan DIY dan Menjuari berbagi Festival, antara lain Festival Desa Budaya, Gelar Potensi Desa Budaya, Festival Bentara Upacara Adat, dll

INTERPRETASI

Desa Budaya Brosot seperti desa- desa lain di Kabupaten Kulonprogo, mempunyai penduduk yang homogen, berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga masih mempunyai ikatan kekerabatan. Hal ini menciptakan suasana damai dan persaudaraan yang menciptakan kerjasama yang erat untuk menyelesaikan segala permasalahan dan kebutuhan Warga Desa Budaya Brosot. Hubungan kekerabatan inilah yang mengurangi bahkan meniadakan konflik. Dua hal, yaitu riwayat kerjasama yang baik dan tidak adanya konflik yang menonjol, memberikan *Starting Condition* yang baik untuk memulai *Collaborative Governance*.

Desa Budaya Brosot mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas, dengan jalan desa yang tertata dengan baik dengan perkerasan beton dan aspal, menjadikan tidak ada alasan untuk tidak dapat menghadiri pertemuan atau *face to face dialog*. *Face to face dialog* di dorong oleh format forum yang mempergunakan budaya *arisan* di Desa Budaya Brosot. Budaya *Arisan* adalah pertemuan, dimana pada saat pertemuan dilakukan pengumpulan uang, dan hasilnya di serahkan kepada Pemenang Undian yang berkewajiban untuk *ngunduh* atau menjamu dan menyediakan tempat bagi pertemuan berikutnya. Sehingga masalah tempat dan jamuan teratasi. Apabila ada peserta yang tidak hadir, maka tidak mempunyai kesempatan untuk

118 memenangkan arisan. Dan apabila sering tidak datang ketempat arisan, maka apabila suatu saat Dia *ngunduh arisan* maka peserta arisan yang lain tidak akan datang. Hal ini merupakan sangksi sosial yang berat, sehingga memaksa setiap peserta forum untuk menyempatkan hadir dalam pertemuan.

Trust Building di dukung oleh sejarah tanpa adanya konflik yang menonjol di Desa Budaya Brosot dan karakteristik warga Desa Brosot yang kebanyakan masih mempunyai hubungan kekerabatan, sehingga pertemuan berlangsung akrab dan mudah untuk menyatakun visi.

Menjadi seorang Pemimpin yang melaksanakan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot harus mempunyai legitimasi sebagai pemimpin informal yang mempunyai serangkaian kemampuan, baik dari kewibawaan, Komitmen, Ketokohan, Kemampuan organisasi, Bersifat suka memberi, dan Keaktifan melaksanakan keputusan. Ketokohan dibentuk dengan sejarah panjang nenek moyang yang selalu *mokogi* dalam berbagai urusan di Desa.

Comitment to Process dipengaruhi oleh budaya musyawarah mufakat dan budaya *patrinealistik* yang menciptakan *patron* yang selalu memberi perlindungan dan *client* yang menciptakan ketaatan. *Comitment to process* tercermin pada kesediaan menerima hasil musyawarah, pelaksanaan gotong royong dan swadaya. Budaya Orang Jawa untuk selalu berkata manis namun berbeda dengan apa yang ada di hatinya atau sering disebut *nggih ra kepanggih*, yaitu didepan berkata iya tapi dibelakang berkata tidak. Bisa jadi pada saat musyawarah berkata iya terhadap hasil mufakat, namun kenyataannya tidak, hal ini nantinya dapat terlihat pada waktu pelaksanaan. Pada waktu pelaksanaan, keterlibatan peserta forum dapat dibagi dalam tiga tingkatan, yaitu *mokogi*, *ngombyongi*, dan *mosoboda*. Bisa jadi ketika dalam musyawarah berkata iya namun hatinya berkata tidak sehingga dalam pelaksanaan Dia hanya *ngombyongi* bahkan *mosobodoa*. *Share understanding* dibangun dengan budaya

ngaruhke di luar rapat atau *arisan*.

Dari semua hal tersebut, budaya ternyata berpengaruh nyata terhadap keberhasilan *Collaborative Governance* di Desa Budaya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot dipengaruhi oleh *Starting Condition*, *Institutional Design*, dan *Facilitative Leadership*. Hal ini sebagaimana model yang ditulis oleh Ansell dan Gash (2007). Namun pada pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot faktor *Starting Condition*, *Institutional Design*, dan *Facilitative Leadership* serta *Collaborative Process*, juga dipengaruhi oleh faktor budaya

Faktor faktor budaya itu antara lain:

1) Hubungan Kekerabatan

Hubungan Kekerabatan yang baik menjadikan Desa Budaya Brosot tidak pernah mempunyai riwayat konflik yang menonjol dan malahan mempunyai riwayat kerjasama yang baik. Hal ini berpengaruh pada *starting condition* dan *collaborative process*.

2) Arisan

Arisan merupakan budaya yang memaksa dengan sukarela peserta forum untuk hadir. Apabila ada peserta yang tidak hadir, maka tidak mempunyai kesempatan untuk memenangkan arisan. Dan apabila sering tidak datang ketempat arisan, maka apabila suatu saat Dia *ngunduh arisan* maka peserta *arisan* yang lain tidak akan datang. Hal ini merupakan sanksi sosial yang berat, sehingga memaksa setiap peserta forum untuk menyempatkan hadir dalam pertemuan. Sehingga pertemuan biasanya mencapai *quorum*. Hal ini berpengaruh terhadap *institutional design* yang akan berpengaruh pula terhadap *collaborative process*.

3) Jam Karet

Pertemuan biasanya berlangsung malam hari dan waktu perte-

muan tidak ditentukan dengan jam, namun dengan penanda waktu *bakda isya*. Hal ini menjadikan waktu mulai pertemuan tidak jelas dan cenderung mundur, sehingga waktu untuk membahas masalah menjadi lebih sempit.

4) Musyawarah Mufakat dan *nggih ra kepanggih*

Dalam pertemuan Desa Budaya tidak dikenal yang namanya voting, setiap permasalahan dicarikan solusi yang terbaik dengan memberi setiap anggota forum untuk mengemukakan pendapatnya, dan diambil pendapat terbaik untuk mufakat. Mufakat merupakan salah satu dari unsur *commitment to process*. Mufakat ini terkadang hanya hadir dipermukaan, ada kebiasaan Orang Jawa untuk *nggih ra kepanggih* didepan setuju namun di hatinya tidak. Hal ini nantinya terlihat pada *commitment to process* yang berwujud gotong royong dan swadaya guna mewujudkan mufakat tersebut.

5) Ngaruhke

Apabila ada perbedaan pendapat yang tajam pimpinan melaksanakan *facilitative leadership* dengan cara *ngaruhke*, berkunjung ke rumah, silaturahmi, berdiskusi, dan bernegosiasi empat mata. Dan langkah ini ternyata berhasil untuk menghindari konflik.

6) Gotong royong dan Swadaya serta *Mokogi, Ngombyongi, dan Mosobodoa*

Gotong royong dan swadaya merupakan *commitment to process* untuk mewujudkan mufakat, hal ini dipengaruhi budaya *nggih ra kepanggih*. Kita tidak akan mengetahui pendapat yang sebenarnya sebelum melihat, Mereka melaksanakan Gotong Royong dan Swadaya. Sikap dalam gotong royong dan swadaya ini lah nanti terlihat pendapat sebenarnya atas mufakat tersebut. Dan tingkatnya adalah *mokogi, ngombyongi, dan mosoboda*. *Mokogi* apabila didalam forum dia berkata iya atau setuju terhadap mufakat sesuai hatinuraninya, dan apabila ada ketidaksetujuan maka dalam

pelaksanaan gotong royong dan swadaya, dia akan *ngombyongi bahkan mosobodoa*.

7) Paternalistik

Paternalistik berpengaruh besar terhadap *collaborative process* dimana seorang pemimpin akan didengar pendapatnya dan di patuhi perintahnya. Hal ini karena usia, kewibawaan, ketokohan, dan kepinterannya.

8) OSIS

OSIS, atau Orangnya Sekitar Itu itu Saja, Di Desa Budaya Brosot Orang yang menjadi Pengelola Desa Budaya duduk sebagai pengurus di organisasi kemasyarakatan lainya. Hal ini menguntungkan karena Pengelola Desa Budaya mampu menggerakkan potensi atau bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan lainya dengan baik melalui Personil Pengelola Desa Budaya yang juga menduduki pengurus di organisasi kemasyarakatan tersebut. Dampak buruknya, adalah kurangnya ide dan wawasan untuk mengembangkan Desa Budaya Brosot.

SARAN

Dalam pelaksanaan *collaborative governance* di Desa Budaya Brosot, masih ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki, antara lain:

- 1) Budaya untuk mengadakan *arisan* atau rapat dengan waktu yang jelas dan dimulai tepat waktu.
- 2) Budaya *nggih ra kepanggih* harus dihilangkan, pendapat harus dinyatakan sebenarnya, untuk dihindari rasa sungkan dan takut menyinggung orang lain.
- 3) Budaya OSIS, mulai dikurangi, dengan memberi kesempatan kepada orang lain dan anak muda untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Desa Budaya Brosot.

122 DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Agranoff, Roberts. *Leveraging Networks: A Guide for Public Managers Working Across Organizations*. Washington, DC: IBM Endowment for The Business of Government, 2003
- Chris Ansell and Alison Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, Berkeley: University of California, 2007
- Booher, David E.. *Collaborative Governance Practise and Democracy*. National Civic Review, 2004
- Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, *Penyusunan Strategi Pengelolaan Desa Budaya*, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DIY, 2005
- Glasser and Straus, *the discovery of grounded theory*, New Jersey: Transaction Publishers. 1967
- Kartini, Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali. 1986
- Lincoln. Y. S. and Guba. E. G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage. 1985
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Pemerintah Desa Brosot, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*, Yogyakarta: Pemerintah Desa Brosot, 2008
- Pemerintah Desa Brosot, *Profil Desa Brosot*, Yogyakarta: Pemerintah Desa Brosot, 2008
- Pemerintah Desa Brosot, *Profil Desa Budaya Brosot*, Yogyakarta: Pemerintah Desa Brosot, 2009
- Rahardjo, Mudjia. *Analisi Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik)*, 2010
- Robetson, Peter J.. *An Assessment of Collaborative Governance in a Network for Sustainable Tourism: The Case of RedeTuris*, National Public Management Research Conference, Los Angeles, CA, USA: School of Policy, Planning, and Development, University of Southern California, October, 2009
- Singarimbun, Masri, dan Sofian, *Metode Penelitian Survey (ed)*, Jakarta: LP3ES 1989
- Spradley, James P., *Metode Penelitian Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1980.
- Surachmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung:, 1980
- Sutisna, Ade. *Etnografi Sebagai Penelitian Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, 2012.
- Tim Inisiator Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, *Bersama*

- Membangun Kolaborasi Pengelolaan Ekosistem Taman Nasional Batang Gadis*, Tim Inisiator Kolaborasi Pengelolaan Taman Nasional Batang Gadis, 2005
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008
- Wiratno, et al, *Berkaca di Cermin Retak: Refleksi Konservasi dan Implikasi Bagi Pengelolaan Taman Nasional*. Jakarta: The Gibbon Foundation Indonesia. 2004

JURNAL

- Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, *Jurnal of Public Administration Research and Theory*, 2011.
- Mandell, Myrna P, and Toddi A. Steelman, *Understanding What Can Be Accomplished Through Interorganizational Innovations: The Importance of Typologies, Context, and Management Strategies*. *Public Management Reviews*. 2003
- Mandell, M. and Keast, R. *Evaluating Network Arrangement: Toward Revised Performance Measures*. *Public Performance and Management Review*. 2007
-